

Edisi 18/Th.2/ Agustus 2016

wartam

berpikir, berkata, berbuat dharma



Prof. Dr. Ngh. Duija, M.Si



Mokshartham Jagadhita : **Merdeka tanpa koma**

Wawanrasa dengan Rektor IHDN Denpasar Bali

'merdeka ragawi dan merdeka jiwani'



ISSN 2442-6911
9 17724421691009
18/2/8/16 RP.15.000,-



Nyoman Yoga Segara

Dari suara pelaku sejarah, baik yang dilisankan maupun yang tertulis, telah lama memompa keyakinan kita bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 bukanlah kado gratis apalagi hadiah cuma-cuma dari penjajah. Pada pokoknya, kemerdekaan itu diperjuangkan bukan terberi begitu saja. Tidak mudah diakhir kolonialisme bangsa ini bisa tersenyum. Butuh pengorbanan mahabesar, mirip-mirip Pandawa saat menegakkan dharma di atas medan Kuru Ksetra.

Dus, selang 71 tahun kemudian, banyak yang sering berteriak, tidak saja melalui tulisan tapi juga di jalanan. Propaganda yang selalu berulang adalah kita masih belum merdeka, meskipun tuntutan ini jamak hanya searah kemauan jaman, tumbal sulam tanpa solusi. Tak lebih hiasan nirmaknawi yang khas menjelang tujuhbelasan. Tapi begitulah adab demokrasi.

Dulu, saat Orde Lama memerintah, tidak sedikit yang merasa belum merdeka karena kokohnya hegemoni ideologi Soekarno. Saat Orde Baru berkuasa, sebagian besar orang juga belum merasa merdeka karena Soeharto menancapkan kuku korupsi, kolusi, nepotisme

begitu dalam. Kini, di era reformasi tuntutan orang makin kompleks, tidak hanya menyangkut isu kedaerahan dan nasional, tetapi juga global.

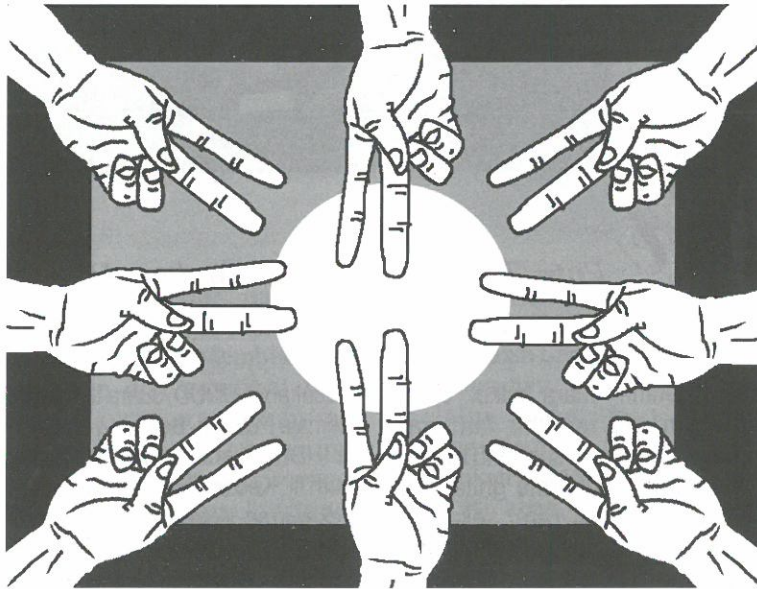
Makna kemerdekaan tentu beririsan dengan banyak aspek dalam kehidupan, entah aspek alamiah maupun sosial. Hampir semuanya berakhir dengan tanda koma, karena sekali lagi, kandungan makna itu bisa terus mengalami intersepsi dan kontekstualisasi. Seturut dengan itu, dalam rentang waktu yang sebetulnya singkat ketimbang umur masuknya Hindu ke Indonesia, tidak sedikit umat yang merasa belum merdeka sepenuhnya di bumi nusantara.

Bertali kelindan dengan "kepasrahan" umat Hindu itu, lebih dari 250an "agama lokal" dan aliran kepercayaan (data Kemenbudpar, 2003) juga merasakan hal serupa. Bahkan beberapa di antaranya galak mengklaim merekalah agama asli nusantara, yang lainnya impor tapi masih dan terus termarginalkan. Mereka tentu boleh "cemburu", sama cemburunya dengan umat Hindu yang meski sudah resmi diakui dan mendapatkan pelayanan kelas satu, tetapi selalu merasa minor, bahkan imperior. Nukilan

cerita kecil berikut ada benarnya. Seorang pembicara sebuah sarasehan nasional, tiba-tiba membangkitkan ingatan kolektif tentang kenafian sebuah imperioritas. Ia yang seorang Jawa sering diledek, "*kamu hebat ya, sayangnya Hindu*". Cerita senada diceritakan seorang mahasiswa, masih dari Jawa saat sidang skripsi: "*kamu kok necis, mau sarjana pula, pasti bukan Hindu ya?*" 1001 cerita lirih seperti ini jika diperdengarkan, terutama oleh umat Hindu di luar Bali, mungkin bisa menguras air mata, sekaligus saat bersamaan tumbuh fanatisme. Jika sudah begini, cerita indah diakhir proklamasi kemerdekaan bisa terlupakan.

Hindu marginal? Hindu didiskriminasi? Oleh siapa, dan mengapa? Ah..tidak perlu larut dengan nostalgia tentang masa-masa awal masuknya Hindu ke Indonesia, atau hanya menghibur diri dengan segala kemewahan ajaran Hindu yang telah menafasi lambang negara, bendera negara, semboyan negara, tetapi alpa dengan apa yang harus dilakukan. Romantisme itu cukup seperti kaca spion yang dilirik sebentar saja saat berkendara, sebab terlalu lama, celaka 12 menunggu. Yang terparah menjangkiknya

Mari Bung, Merdekaakan Diri!



post power syndrome, ujung-ujungnya adalah munculnya delusi dengan cara memompakan masa lalu sebagai sesuatu yang harus dihidupkan di masa kini menjadi tak terelakkan.

Jadi, jika misalnya kita bermobil, kaca besar di depan adalah sebuah visi yang harus dikais, spion kecil hanyalah *reminder* masa lalu yang akan tetap dan selalu menjadi milik kita selamanya. Masalahnya kita selalu dan masih berdebat dengan urusan *remeh temeh* atau berkelahi dengan teman dan saudara sendiri. Jangan-jangan kita juga sedang melemahkan dan mengkerdilkkan diri

sendiri, bukan umat lain apalagi negara.

Kemerdekaan itu tidak seperti kita sedang menunggu datangnya godot, tetapi diperjuangkan, bukan *taken for granted*. Membicarakan kemerdekaan masa depan Hindu tidak boleh lepas dari politik negara, terutama pembangunan manusia Indonesia. Artinya, kualitas SDM Hindu harus seturut dengan keinginan negara. Itu artinya, umat Hindu juga perlu memikirkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu pengukuran perbandingan dari harapan

hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup (kesehatan). Secara umum, IPM Indonesia meski sejak 2009 (0,593) sudah berada pada angka 0,600 (2010), 0,617 (2011), dan 0,629 (2013) tetapi masih jauh dari Norwegia yang sudah menyentuh angka 0,965. Begitu juga ditingkat Asia, kita harus bekerja keras menyamai Jepang yang sudah sampai angka 0,649.

Sekali lagi, untuk meningkatkan kualitas manusia Hindu dengan berbagai program perlu ketersediaan data, sayangnya itu berharga mahal *saking* sulitnya memvalidasi. Kita tidak pernah bisa lugas menjawab jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, dll padahal ini menjadi pintu masuk untuk memerdekakan umat Hindu dari gapnya dengan umat lain. Melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, ditambah *sraddha* dan *bhakti* yang baik, umat Hindu bisa berteriak lantang untuk sejajar dengan kualitas umat lainnya. Merdeka!

Dan jika kita terlalu percaya membabi buta, lalu akhirnya tidak berbuat apa-apa, ramalan Jayabaya tentang keemasan Hindu akan lewat begitu saja. Ramalan yang hanya numpang lewat dan berlalu persis di depan hidung kita.

*Antropolog IHDN Denpasar